

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SINTYA DELPIANTI. D
NPM : 177310030

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi” dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau ;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu ditempat yang beliau pimpin;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan

sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini;

4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sebersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian;
5. Bapak dan ibu dosen Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, serta Perpustakaan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis
7. Teristimewa penulis haturkan kepada Ayahanda Delepi Ibunda Erli Yanti Abang Irfan Sepriyan D.STP, M.Si, Kakak Ipar Briptu Eva Yulianti, S.H, Adik Veby Delpianty.D dan Zhakiyah Delpianty.D yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Bapak Camat Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi beserta staf dan Bapak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan data pendukung bagi penulis

9. Kepada sahabat saya Neka Nopendra, Susianti, Erna Dila Witri, yang telah menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya.

10. Kepada Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu pemerintahan yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Penulis

Sintya Delpianti. D

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Pemerintahan	14
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	18
3. Konsep Kesejahteraan Sosial.....	20
4. Konsep Peranan	23
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Konsep Operasional.....	32
E. Operasional Variabel	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan dan Key Informan Penelitian	35
D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan	36
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Teknik pengumpulan Data	37
G. Analisis Data	38
H. Jadwal Waktu Penelitian	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	40
B. Gambaran Umum Kecamatan Sentajo Raya	46
C. Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan....	55
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Identitas Informan	57

B. Hasil Penelitian Tentang Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	60
C. Hambatan-Hambatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	75
BAB VI :PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78



DAFTAR TABEL

I.1	Jumlah Penduduk Provinsi Riau beserta jumlah TKSK di Provinsi Riau	9
1.2	jumlah penduduk perkecamatan di kabupaten Kuantan Singingi beserta jumlah TKSK dikabupaten Kuantan Singingi	10
I.2	Daftar Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).....	11
II.1	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	29
II.2	Operasional Variabel Penelitian.....	33
III.1	Informan Penelitian	36
III.2	Jadwal Waktu Penelitian	39
IV.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi	41
IV.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi	44
IV.3	Nama-nama Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	46
V.1	Usia Informan Penelitian tentang Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosia Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	57
V.2	Jenis Kelamin Informan Penelitian tentang Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosia Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	58
V.3	Tingkat Pendidikan Informan Penelitian tentang Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosia Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	59

DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pikir.....	31
IV.1	Struktur Organisasi Kecamatan Sentajo Raya	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian 82
2. Daftar Pertanyaan Wawancara 89



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sintya Delpianti D
NPM : 177310030
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sastra Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti saya syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun saja.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Pernyataan

Sintya Delpianti. D

PERANAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

SINTYA DELPIANTI.D

Kata kunci : Peranan, Tenaga Kesejahteraan Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dalam Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator pada peranan yang digunakan meliputi Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi, Pertemuan. Tipe penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria, Teknik Pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifikasi keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang teliti. Berdasarkan teknis analisis di atas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Kurangnya Komunikasi antara TKSK dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya, Kurangnya Pertemuan berupa rapat kerja antara TKSK dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya.

THE ROLE OF DISTRICT SOCIAL WELFARE PERSONNEL IN THE
IMPLEMENTATION OF SOCIAL WELFARE IN SENTAJO RAYA
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRACT

SINTYA DELPIANTI.D

Keywords: Role, Social Welfare Personnel

This study aims to determine the role of the District Social Welfare Personnel in the Implementation of Social Welfare in the Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency and to find out the Barriers to the Role of the District Social Welfare Workers in the Implementation of Social Welfare in the Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. indicators on the role used include Planning, Division of Work, Communication, Meetings. Type of qualitative research. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Purposive Sampling is a technique that includes people who are selected on the basis of criteria, Data collection techniques consisting of interviews, observations, documentation, the collected data is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectification of the existence of research objectives in careful locations. Based on the technical analysis above, the researchers assessed and concluded that there was a lack of communication between TKSK and the Sentajo Raya District, and the lack of meetings in the form of work meetings between TKSK and the Sentajo Raya District.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dan jumlah penduduk yang besar, sehingga Indonesia menganut sistem Otonomi Daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Sistem otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah berlaku pertama kalinya di Indonesia dengan terbitnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Kemudian berubah menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan terakhir di ubah menjadi undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memajukan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan membimbing masyarakat dalam mengembangkan kreativitasnya yang berguna untuk membangun usaha agar dapat meningkatkan perekonomian warga daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membangun serta memajukan daerahnya juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. (<https://www.kompasiana.com/evawanih85160>)

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial

sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh kursus bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSk), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Pekerja Sosial sendiri merupakan profesi utama dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu melibatkan Pekerja Sosial baik dalam tataran mikro, mezo maupun makro. Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayanannya.

Mengenali tentang siapa pekerja sosial akan memunculkan beberapa figur meliputi mereka yang tergolong profesional dan non profesional. Kepmensos No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang

diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan 4 jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial.

Jika mengacu pada dua peraturan tersebut maka Pekerja Sosial dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada kerja sosial fungsional/PNS. Pertanyaannya bagaimana dengan Pekerja Sosial non profesional atau relawan sosial TKSK termasuk didalamnya juga para pendamping lapangan? Padahal peran mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial sangat besar. Terlebih melihat kenyataan bahwa Pekerja Sosial Profesional masih sangat terbatas sehingga keberadaan para Tenaga Kesejahteraan Sosial sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mensukseskan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial. Pertanyaannya siapa yang dapat dikatakan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan

kesejahteraan sosial selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/ kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator/ manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan/ menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah: “Seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan / atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial”.

Kementerian Sosial melaksanakan program generik dan program teknis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, maka program dalam bidang kesejahteraan Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Pemberdayaan Sosial.
4. Program Penanganan Fakir Miskin.

Permasalahan sosial yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini adalah program penanganan fakir miskin, beberapa contoh program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe) melalui pemberdayaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) perkotaan dan perdesaan, Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT), Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013, Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) pada tahun 2014, Bantuan Beras Miskin (Raskin) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Dengan banyaknya program tersebut kementerian sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dalam peraturan tersebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan didefinisikan sebagai berikut: “Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan / atau dinas instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten / kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di

kecamatan. TKSK yang merupakan tenaga relawan sosial terlatih dan terdidik yang menjadi sumber aspirasi bagi relawan sosial dan pekerja sosial lainnya dengan aksi dalam membantu program pemerintah.

Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam panduan petunjuk teknis wajib terlibat dan wajib dilibatkan dalam berbagai kegiatan serta pendampingan program sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bekerja dengan arahan dari Kementerian Sosial dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak terkait langsung dengan struktur dalam pemerintahan kecamatan tetapi merupakan binaan dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Prinsip yang dianut adalah bersifat sukarela, semangat untuk mengabdikan, dan bertanggung jawab.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditugaskan di wilayah kecamatan mempunyai kecenderungan mewakili peran pekerja sosial dalam menangani masalah sosial di wilayah kecamatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang ditemukan di wilayah kerjanya.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibentuk dalam rangka membantu pemerintahan di setiap kecamatan, untuk mengumpulkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) telah diakui sebagai gerak dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Kedua jenis data ini menjadidi dasar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pelayanan sosial. Akan tetapi untuk mendapatkan data yang valid diperlukan metodologi dan instrument yang

benar-benar mampu mengukur jenis berdasarkan konsep dan indikatornya. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan kesejahteraan sosial dimasyarakat selalu muncul kapan saja dan dimana saja, sehingga diperlukan penanganan dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program.

Untuk menjembatani itu semua maka diperlukan yang namanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator atau manager pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan, untuk membantu camat dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dengan asumsi bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Adapun tugas TKSK didalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan permensos Nomor 28 tahun 2018 bab II pasal 4 tentang kesejahteraan sosial kecamatan meliputi :

1. Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
2. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
3. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK berkoordinasi dengan kecamatan

5. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Adapun fungsi TKSK didalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 bab II pasal 5 meliputi :

1. Koordinasi
2. Fasilitas; dan
3. Administrasi

Koordinasi menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 dalam pasal 5 huruf a merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk yaitu saling memberikan informasi, menyamakan persepsi dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan fasilitasi menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 pasal 5 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak dan langsung dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan rujukan sedangkan administrasi menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 pasal 5 huruf c merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan dan pelaporan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi bahwa dalam melaksanakan Pokok dan fungsi pemberdayaan sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan harus bekerja seorang diri dalam satu wilayah kecamatan. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antara wilayah penugasan dengan jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan yang harus bertanggung jawab membantu menyelenggarakan program pemerintah dalam menunjang kesejahteraan sosial masyarakat. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa setiap satu kecamatan memiliki satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan luas wilayah yang beragam ini.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Provinsi Riau beserta Jumlah TKSK di Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk/jiwa	Jumlah Kecamatan	Jumlah TKSK
1	Kabupaten Bengkalis	593.397 Jiwa	11 Kecamatan	11 TKSK
2	Kabupaten Indragiri Hilir	652.342 Jiwa	20 Kecamatan	20 TKSK
3	Kabupaten Indragiri Hulu	430.230 Jiwa	14 Kecamatan	14 TKSK
4	Kabupaten Kampar	790.313 Jiwa	21 Kecamatan	21 TKSK
5	Kabupaten Kepulauan Meranti	206.116 Jiwa	9 Kecamatan	9 TKSK
6	Kabupaten Kuantan Singingi	755.109 Jiwa	15 Kecamatan	15 TKSK
7	Kabupaten Pelalawan	381.949 Jiwa	13 Kecamatan	13 TKSK
8	Kabupaten Rokan Hilir	637.161 Jiwa	18 Kecamatan	18 TKSK
9	Kabupaten Rokan Hulu	561.385 Jiwa	16 Kecamatan	16 TKSK

10	Kabupaten Siak	457.940 Jiwa	14 Kecamatan	14 TKSK
11	Kota Dumai	286.000 Jiwa	7 Kecamatan	7 TKSK
12	Kota Pekanbaru	1.045.039 Jiwa	15 Kecamatan	15 TKSK

Sumber : Data Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat 12 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Dari 12 kabupaten/kota tersebut peneliti mengambil satu lokasi penelitian di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dari pengamatan peneliti dapatkan masyarakat disekitar peneliti banyak yang bercerita tentang data-data penerima bantuan yang kurang sesuai.

Dapat di lihat tabel dibawah ini jumlah penduduk/jiwa kecamatan Sentajo Raya beserta jumlah TKSK di Kecamatan Sentajo Raya.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi beserta Jumlah TKSK di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk/jiwa	Jumlah TKSK
1	Kuantan Mudik	25.148	1 Orang
2	Kuantan Tengah	50.638	1 Orang
3	Singingi	33.607	1 Orang
4	Kuantan Hilir	13.941	1 Orang
5	Cerenti	15.817	1 Orang
6	Benai	17.516	1 Orang
7	Gunung Toar	13.991	1 Orang
8	Singingi Hilir	42.495	1 Orang
9	Pangean	19.799	1 Orang
10	Logas Tanah Darat	23.446	1 Orang
11	Inuman	16.342	1 Orang
12	Hulu Kuantan	9.165	1 Orang
13	Kuantan Hilir Seberang	11.086	1 Orang
14	Sentajo Raya	30.778	1 Orang
15	Pucuk Rantau	10.373	1 Orang

Sumber : data Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021

Untuk mempersempit lokus, peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Sentajo Raya. TKSK mempunyai banyak tugas dalam melaksanakan dan pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintah, antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam bentuk sembako. Bantuan Sosial Tunai (BST). ini disalurkan melalui rekening yang didalamnya terdapat saldo yang tidak bisa di uangkan. Cara penyaluran nya bekerjasama dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri menunjuk agen- agen yang ada di kecamatan yang di beri nama E-Warung. Di Kecamatan Sentajo Raya memiliki 7 E-warung di Langsung Hulu, Geringging Jaya, Teratak Air Hitam, Jalur Patah, Kp Baru Sentajo, Muaro Sentajo. Pulau Kopung Sentajo.

Pada tahun 2020 penerima bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST). berjumlah 1453 orang terbagi di 15 Desa di Kecamatan Sentajo Raya dengan jumlah saldo Rp. 200.000 per orang penerima bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

NO	DESA	PENERIMA
1	Muara Langsung	104
2	Langsat Hulu	214
3	Marsawa	104
4	Geringging Baru	122
5	Beringin Jaya	143
6	Jalur Patah	84
7	Teratak Air Hitam	84
8	Parit Teratak	75
9	Seberang Teratak	31
10	Pulau Komang Sentajo	42
11	Muaro Sentajo	83
12	Koto Sentajo	34
13	Kampung Baru Sentajo	90
14	Pulau Kopuang Sentajo	130
15	Geringging Jaya	123
JUMLAH		1453

Sumber : Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kecamatan Sentajo Raya 2021.

Dari beberapa data dan observasi awal di lapangan peneliti menemukan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Terindikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan belum bekerja maksimal hal ini terlihat dari masih ada kesalahan data Bantuan Sosial Tunai (BST)
2. Terindikasi masih kurangnya koordinasi dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, yang dirumuskan dalam judul “Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa faktor yang dapat mempengaruhi Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan ini penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui hambatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Sentajo Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Secara praktis, Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan.
- c. Secara Akademis, Sebagai bahan referensi dan sumber ilmu pengetahuan bagi akademik dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti "*Act, fact, manner, of governing*" atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. *Governance* adalah suatu proses atau kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atau kepentingan-kepentingan yang ada.

Pemerintahan adalah suatu ilmu atau seni. Dikatakan seni karena banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Syafiie (2011:20)

Sementara itu menurut Soemendar dalam Syafiie (2011:8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan

masyarakat dan legitimasi. Pemerintah mengandung arti Lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Menurut Ndraha (2005:69) Good governance di artikan sebagai pemerintah dan juga di artikan pemerintahan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maskud yang sama:

- a. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintah adalah dalam arti luas di defenisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan, lembaga dan petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintahan merupakan suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan pemerintah adalah organ atau yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan. Ndraha (2003)

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan namun dalam paradigm baru

pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintah menurut Syafiie (2011:15) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti bahan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengaur dan mengurus rakyat
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
- d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa Pendidikan pemerintahan,

mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materiaa maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas Syafiie (2011).

Menurut Budiarjo (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah merupakan segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintahan merupakan semua badan atau oerorganisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. /

Fungsi pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

- 1). Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- 2). Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ndraha, 2011 : 85).

Pemerintahan berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah dalam Napitupulu (2017:7)

Menurut Napitupulu (2019:9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlansungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea ke empat. Pemerintah dalam ini adalah segenap alat perlengkapan Negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan, pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. Napitupulu (2012:9-10)

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Labolo (2006:22).

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya” 4 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi :

- 1) Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Tugas pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Implikasi dari ketiga asas tersebut di atas dijelaskan oleh Syafiie (2009:110) sebagai berikut

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

3. Konsep Kesejahteraan Sosial

Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat yang berkembang. Adi (2015:23)

Friedlander & Apte yang dikutip Fahrudin (2014:12) memberikan pandangan tentang apa yang menjadi fungsi dari kesejahteraan sosial, fungsi fungsi tersebut antara lain:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Fungsi-fungsi di atas yang berusaha dicapai dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan

Menurut Rukminto (2005:17) Kesejahteraan sosial adalah: Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup(kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Suharto (2009:153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Pencegahan Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada

kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

- b. Fungsi Penyembuhan Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
- c. Fungsi Pengembangan Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

4. Konsep Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking" artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu atau pekerjaan" peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soekanto (2012) Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dalam meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang-orang di sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar. Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. Ndraha (2003).

Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya atau tidak. Viethzal Rivai (2004)

Peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif, artinya menunjukan pada perilaku yang mengandung secara keharusan untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata di sebut sebagai norma sedang yang di anut kasat mata adalah tuntunan. Mifta Thoha (2012)

Peran timbul karena seseorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirinya. Dia mempunyai lingkungan, yang setiap saat ia perlu untuk berinteraksi. Lingkungan ini luas dan beraneka macam, dan saat masing-masing manajeger mempunyai lingkungan yang berlainanan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakiatnya tidak ada perbedaan, baik manajer tingkat atas, tegan

maupun bawah akan mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbeda lingkungan yang akhirnya membuat bobot peranan itu sedikit berbeda. Miftah Thoha (2012)

Peranan adalah aspek dinamis dan kedudukan yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran. Soejono Soekanto (2002)

Menurut rivai (2004) Peranan merupakan sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu.

Menurut Soekanto (2003:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan mempermudah birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya difungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak dilengkapi oleh pegawai yang betul-betul professional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam oerorganisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesinambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. Kaho (2002:220).

Menurut Stogdil dalam Giroth (2004:25) mengatakan beliau memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya.

Menurut Juditira dalam Giroth (2004:25-26) bahwa teori peranan adalah teori yang merupakan teori yang merupakan teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi antropologi. Setiap individu memiliki sekumpulan peranan atau aneka ragam peranan (multiple role) yang dibedakan dengan satuan peranan (role set). Satuan peranan itu tidak terpisah dari satuan peranan lainnya tetapi berkaitan dan saling melengkapi.

Giroth (2004:53) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang akan dilakukan ditentukan oleh :

- a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama
- b. Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan.
- c. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalkannya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan samping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Menurut Gross et.all dalam Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian Terdahulu

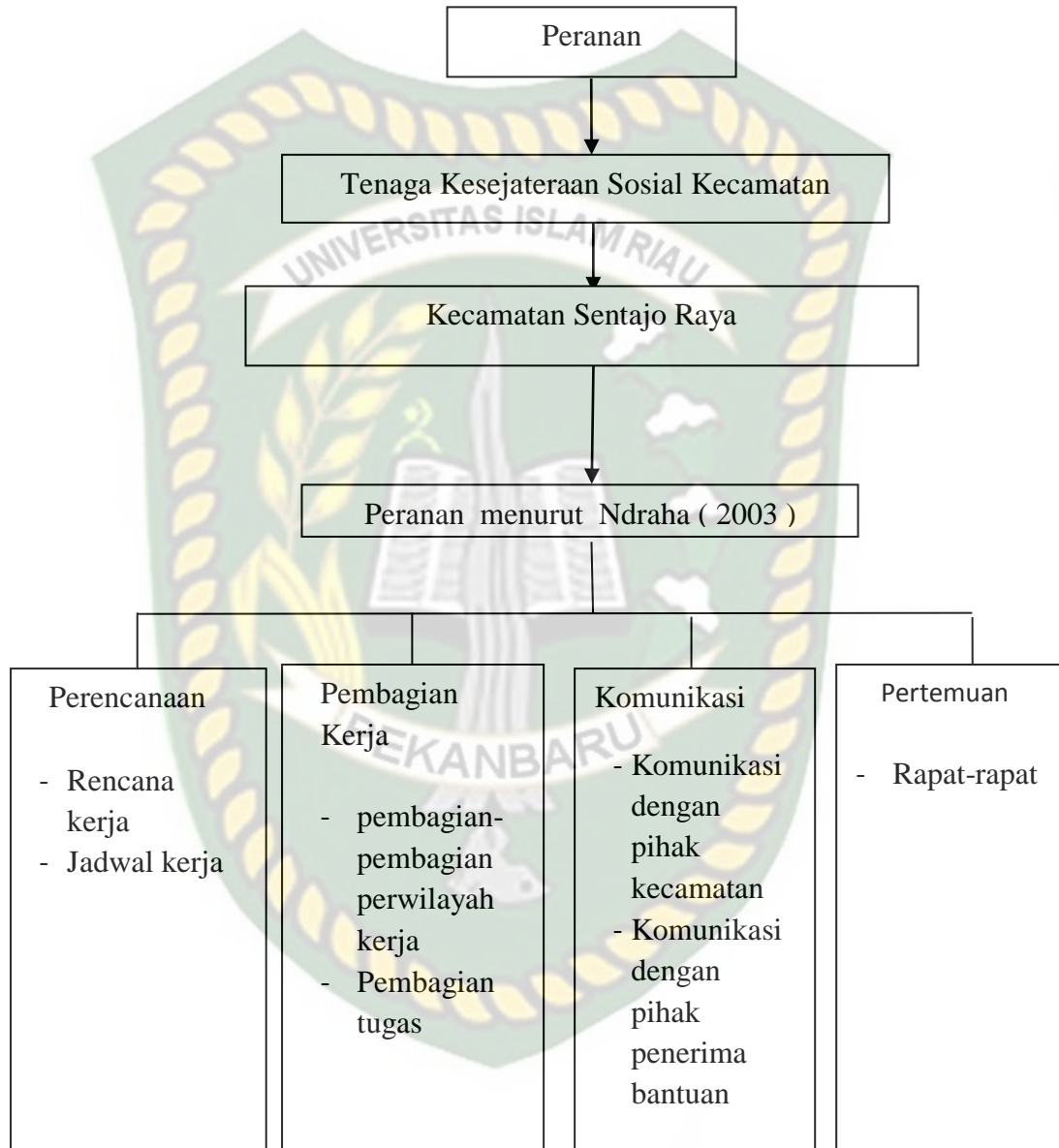
No	Nama Penelitian	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ruli Insani Adhitya	2016	Efektivitas peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (studi kasus tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Umbulharjo dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Pakualaman	-Sama-sama menggunakan metode kualitatif -penelitian sama sama tentang Efektivitas peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Perbedaan lokasi, dimana penelitian tersebut dilakukan dikecamatan umbulharjo dan kecamatan pakualam daerah istimewa yogyakarta, sedangkan penelitian ini berada dikecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi. -dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang peran yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penunggulanga n masalah kesejahteraan kemiskinan sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas

					Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
2	Wisnu Andrianto	2014	Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan masalah Kesejahteraan Sosial (studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)	Subjek formal penelitian yaitu tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan	-Perbedaan lokasi, penelitian tersebut dilakukan kabupaten Malang Sedangkan penelitian ini berada dikecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singing -Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai peran yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial sedangkan penelitian ini tentang efektifitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

C. Kerangka Pikir

Gambar III. 1 Kerangka Berfikir



D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari keliruan dalam penggunaan istilah didalam penulisan ini, maka berikut penulis akan menuangkan konsep-konsep yang setelah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang kajian sebagai berikut:

1. Peranan adalah tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah Seseorang yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementrian Sosial dan dan/atau dinas/intansi sosial provinsi, dinas/intansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
3. Kecamatan Sentajo Raya adalah Intasi atau kantor yang berada di kecamatan Sentajo Raya
4. Perencanaan yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah membuat jadwal untuk survei dan mendata menerima Bantuan Sosial Tunai (BST)
5. Pembagian Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibagi perwilayah kerja atau perkecamatan
6. Komunikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada penerima Bantuan Sosial Tunai

(BST) baik itu berupa informasi terkait pencairan sembako dan informasi dari dinas-dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Pertemuan adalah yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berupa rapat-rapat dengan pihak Kecamatan terkait Bantuan Sosial Tunai (BST)

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel Dimensi	Indikator	Item yang dinilai
Peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan (Ndraha,2003)	Peranan Tenaga Kejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	Perencanaan	a) Rencana kerja b) Jadwal kerja
		Pembagian Kerja	a) pembagian-pembagian wilayah kerja b) pembagian tugas
		Komunikasi	a) kordinasi dengan pihak kecamatan b) komunikasi dengan pihak penerima bantuan
		Pertemuan	a) rapat-rapat

Sumber : Modifikasi penelitian 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian Kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka.

Metode penelitian ini adalah wawancara, yaitu wawancara percakapan dengan maksud tertentu dan percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.(Lexy J.Moleong : 2014)

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara ini termasuk kategori in-depth interview (wawancara mendalam), di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Penelitian ini juga telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. Dalam melakukan wawancara, selain peneliti harus membawa pedoman wawancara, juga harus membawa alat bantu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari pedoman wawancara yang bersifat

terbuka yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang seiring dengan jawaban yang diberikan oleh informan.

B. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis teliti adalah Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dikecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi, maka penelitian ini akan dilaksanakan di kantor camat kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

1. Key Informan

Key Informan Menurut Moleong (2005;3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Sentajo Raya

2. Informan

Informan menurut Moleong (2006;132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Berdasarkan pengertian di atas serta tujuan yang ingin

dipenuhi pada penelitian ini maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Camat Sentajo Raya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya, Masyarakat.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	pekerjaan	Alamat
1	Nopes Scorpion	29	Laki-Laki	S1	TKSK	Desa Pulau Komang Sentajo
2	H. Yulizar M	50	Laki-Laki	S2	Camat	Teluk Kuantan
3	Lilisiana	49	Perempuan	SLTA	IRT	Desa Geringging Baru
4	Mardianis	52	Perempuan	SLTP	IRT	Desa Beringin Jaya
5	Rosmaniar	50	Perempuan	SLTA	IRT	Desa Kampung Baru Sentajo
6	Fauziah	38	Perempuan	SLTA	IRT	Desa Jalur Patah
7	Warsiyem	55	Perempuan	SLTP	IRT	Desa Geringging Jaya

Sumber : *Olahan Peneliti 2021*

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling. Menurut Kriyantono (2007;154) purposive sampling yaitu teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut dijadikan sebagai sampel. Persoalan utama dalam menentukan kriteria, dimana kriteria harus mendukung tujuan penelitian. Biasanya teknik purposive dipilih untuk penelitian yang lebih

mengutamakan kedalaman dari pada untuk tujuan representative yang dapat digeneralisasikan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengambilan data dari hasil wawancara yang di dapat. Dalam hal ini data primer yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah penelitian mengenai adalah Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan juga buku-buku yang berkenaan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan dialog secara mendalam atau percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden guna melengkapi data yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan penelitian ini.

2. Observasi/pengamatan langsung ketempat penelitian dimana penulis langsung mengunjungi tempat penelitian untuk memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran yang terinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kualitatif yang dilengkapi dengan data.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021															
		Februari				maret				Agustus				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan UP	■															
2	Seminar UP			■													
3	Revisi UP				■												
4	Penelitian Lapangan					■	■	■	■								
5	Pengelolaan dan Analisis Data							■	■								
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■				
7	Ujian Skripsi													■	■		
8	Revisi Skripsi															■	
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																■

Sumber : Olahan Penulis 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan

Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi $0^{\circ}00$ Lintang Utara sampai $1^{\circ}00$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ}02$ sampai $101^{\circ}55$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar $25-30^{\circ}$ dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Pucuk Rantau	821.64
2	Kuantan Mudik	564.28
3	Hulu Kuantan	384.40
4	Gunung Toar	165.25
5	Kuantan Tengah	270.74
6	Sentajo Raya	145.7
7	Benai	124.66

8	Pangean	145.32
9	Logas Tanah Darat	380.34
10	Kuantan Hilir	148.77
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29
12	Inuman	450.01
13	Cerenti	456.00
14	Singingi	1.953,66
15	Singingi Hilir	1.530.97
Jumlah		7.656.03

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km².

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu maksimum berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini

menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

3. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter di atas permukaan laut dan dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

4. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2014 sebanyak 310.619 jiwa terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas wilayah 7.656,03 km². Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pucuk Rantau	5895	5040	10935
2	Kuantan Mudik	11549	11329	22878
3	Hulu Kuantan	4386	4191	8577
4	Gunung Toar	6807	6699	13496
5	Kuantan Tengah	23981	22971	46722
6	Sentajo Raya	14293	13595	27888
7	Benai	7900	7922	15822
8	Pangean	9085	9163	18248
9	Logas Tanah Darat	10535	9620	20155
10	Kuantan Hilir	7414	7325	14739
11	Kuantan Hilir Seberang	6502	6428	12930
12	Inuman	7680	7623	15303
13	Cerenti	7612	7336	14948
14	Singingi	16284	14524	30722
15	Singingi Hilir	19593	17563	37156
Jumlah		159,480	151,139	310,619

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

B. Gambaran Umum Kecamatan Sentajo Raya

1. Sejarah Kecamatan Sentajo Raya

Kecamatan Sentajo Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012. Kecamatan Sentajo Raya merupakan penggabungan (fusi) beberapa desa dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai. Kecamatan Sentajo Raya mempunyai luas wilayah 145,70 km terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk 28.704 jiwa. Nama-nama Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel IV.4 Nama-nama Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Nama Desa	Nama Kecamatan
1	Muara Langsung	Sentajo Raya
2	Langsat Hulu	Sentajo Raya
3	Marsawa	Sentajo Raya
4	Geringging Baru	Sentajo Raya
5	Beringin Jaya	Sentajo Raya
6	Jalur Patah	Sentajo Raya
7	Teratak Air Hitam	Sentajo Raya
8	Parit Teratak	Sentajo Raya
9	Seberang Teratak	Sentajo Raya
10	Pulau Komang Sentajo	Sentajo Raya
11	Muaro Sentajo	Sentajo Raya
12	Koto Sentajo	Sentajo Raya
13	Kampung Baru Sentajo	Sentajo Raya
14	Pulau Kopuang Sentajo	Sentajo Raya
15	Geringging Jaya	Sentajo Raya

Sumber : Kantor kecamatan Kecamatan Sentajo Raya 2021

2. Keadaan Geografis

Kecamatan Sentajo Raya yang tergolong kecamatan baru di daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada tahun 2015 ini baru berusia tiga tahun, menurut pengukuran kantor kecamatan memiliki luas 173 km².

Kecamatan ini terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Desa-desa yang ada di Kecamatan ini yaitu Desa Pulau Kopung, Kampung Baru Sentajo, Muaro Sentajo, Koto Sentajo, Pulau Komang, Jalur Patah, Teratak Air Hitam, Seberang Teratak Air Hitam, Parit Teratak Air Hitam, Geringging Baru, Marsawa, Muara Langsat, Langsat Hulu dan Geringging Jaya. Sedangkan kelurahannya yaitu Kelurahan Beringin Jaya.

Batas wilayah Kecamatan Sentajo Raya meliputi:

Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi

Timur berbatasan dengan Kecamatan Benai

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah

Utara berbatasan dengan Kecamatan Pangean dan Logas Tanah Darat.

Wilayah kecamatan Sentajo Raya umumnya merupakan daerah yang datar dan berbukit dan beriklim tropis. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Sentajo Raya pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

3. Pemerintahan

Pusat pemerintahan Kecamatan Sentajo Raya berada di Desa Koto Sentajo. Kecamatan Sentajo Raya dipimpin oleh seorang camat, sekretaris camat dan staf pemerintahan lainnya yang menunjang sistem pemerintahan

kecamatan. Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari 15 desa/kelurahan yang dipimpin oleh 15 kepala desa/kelurahan pula, yang dibantu oleh 15 sekretaris desa, kepala urusan dan staf desa serta beberapa kepala dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Pada tahun 2020 ini tercatat jumlah dusun, RW dan RT di Kecamatan Sentajo Raya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 49 lingkungan/dusun, 84 RW dan 174 RT.

Meskipun masih terbilang sebagai kecamatan baru di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Sentajo Raya sudah mulai membenahi diri terkait sarana dan prasarana penunjang pemerintahan. Di Sentajo Raya terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPTD) di antaranya UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan, PLKB, UPTD Pertanian dan UPTD Peternakan, yang membantu pelayanan pemerintahan.

4. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2020 adalah sebanyak 29.386 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.037 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 14.349 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan Sex Rasio sebesar 104,79, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki. Dengan luas wilayah Kecamatan Sentajo Raya 173 km² dan jumlah penduduknya 29.386 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 169,86 yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 169 penduduk. Kecamatan Sentajo Raya mempunyai

7.406 jumlah rumah tangga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 3,97 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa kelurahan

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif bagi masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan. Secara umum prasarana gedung sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi telah tersedia di setiap kecamatan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi.

Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga pengajar atau guru. Analisis lebih lanjut, tentu tidak hanya melihat ketersediaan guru tapi juga kualitas dan tingkat kemampuan mentransfer ilmu ke anak didi

Profil Kecamatan Sentajo Raya

Dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kecamatan Sentajo Raya, Kantor Camat Sentajo Raya

Visi : Terwujudnya pelayanan prima, transparan, dan memikat hati di Kecamatan Sentajo Raya

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Sentajo Raya yang siap dalam segala hal pelayanan, ramah, dan berdisiplin tinggi.

2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang lebih berkualitas
3. Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk tercapainya kualitas pelayanan yang optimal
4. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, instansi, dan masyarakat
5. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman untuk kepuasan semua pihak.

Budaya Kerja

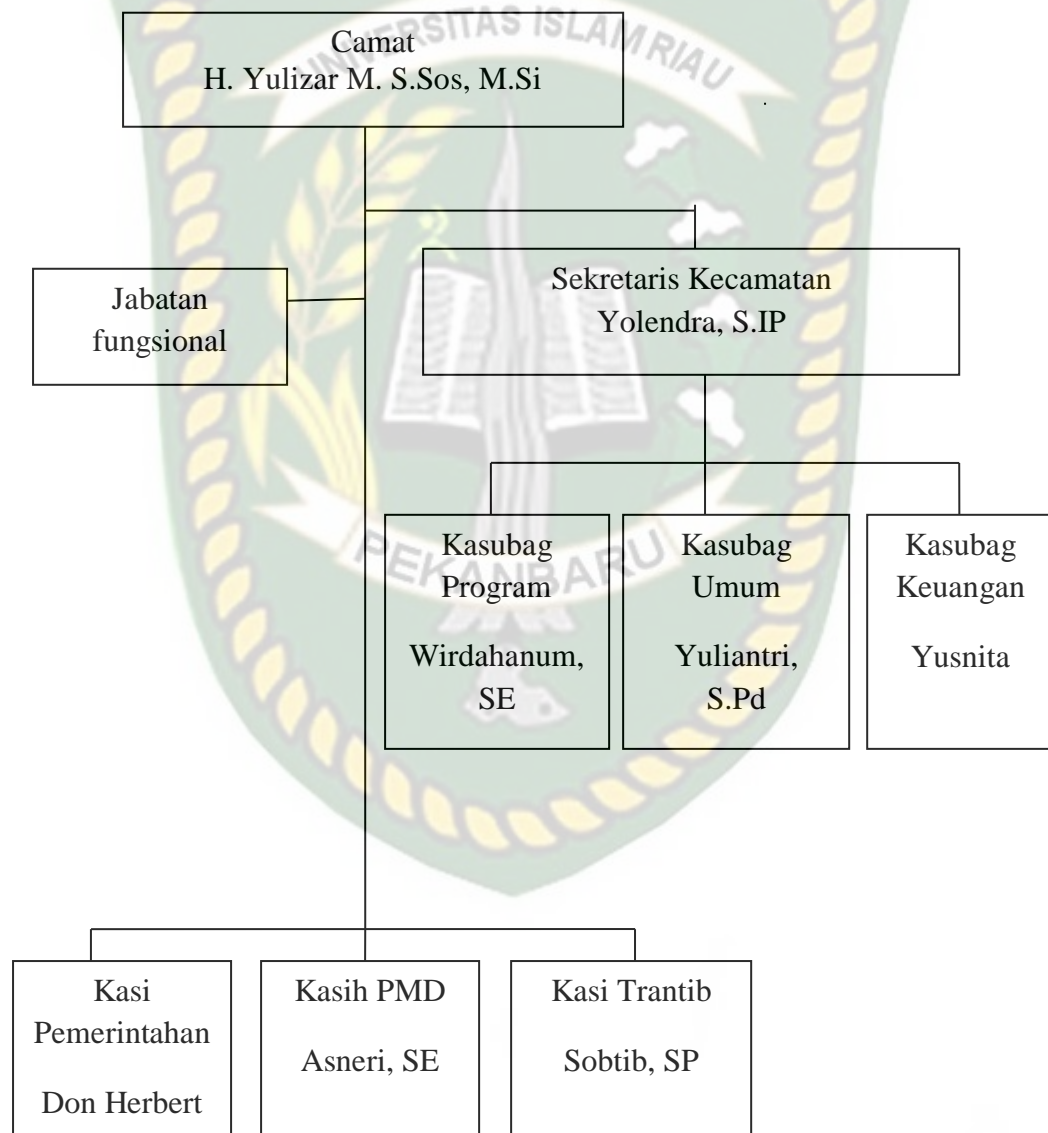
Tumbuhkan 10 budaya malu dalam menjalankan aktivitas sebagai pegawai

Kantor Camat Sentajo Raya:

1. Malu karena datang terlambat/pulang cepat
2. Malu melihat rekan sibuk melakukan aktivitas
3. Malu hanya menuntut hak, tidak tahu dengan kewajiban.
4. Malu karna kerja selalu salah
5. Malu karena kerja selalu salah
6. Malu karena bekerja tidak berprestasi
7. Malu karena tugas tidak terlaksana/selesai tepat waktu
8. Malu berperilaku dan bicara tidak sopan
9. Malu jika tidak sholat berjamaah dan tidak bertegur sapa sesama rekan
10. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kerja/kantor

Menyelenggarakan roda pemerintahan di tingkat kecamatan, kantor Camat Sentajo Raya memiliki struktur organisasi yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun struktur organisasi di Kantor Camat Sentajo Raya sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur organisasi Kecamatan Sentajo Raya



Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi Tentang tata kerja Kecamatan:

1. Camat :

Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, camat memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintah, pemberdayaan masyarakat dandesa, ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

10. Pelaksanaan fungsi pejabat pembuat akan tanah (PPAT) sementara;
11. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintah di wilayahnya.
12. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan.
13. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan bupati
14. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
15. Pelaksanaan pembinaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan :

Membantu Camat dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi urusan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan, kehumasan, perencanaan program, anggaran dan keuangan.

3. Seksi Pemerintahan :

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mencakup pengawasan, pelaksanaan tugas pembantu, kependudukan dan catatan sipil, dan pertahanan.

a. Sub Bagian Umum :

Melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

b. Sub bagian Keuangan ;

Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Program : Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan, dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan.

4. Seksi Tertib :

Penyiapan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan, kegiatan, ketenteraman, dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pendapatan, perizinan, perhubungan, hukum dan perundangundangan dan penanggulangan bencana.

5. Seksi PMD

Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup pertanian, sosial, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pasar, koperasi, industri, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, energi dan sumber daya mineral,

lingkungan hidup, promosi, dan investasi, perencanaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial

C. Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Adapun tugas TKSK didalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan permensos Nomor 28 tahun 2018 bab II pasal 4 tentang kesejahteraan sosial kecamatan meliputi :

1. Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
2. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
3. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK berkoordinasi dengan kecamatan
5. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program penyelenggaran kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Adapun fungsi TKSK didalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 bab II pasal 5 meliputi :

1. Koordinasi

2. Fasilitas; dan
3. Administrasi

Koordinasi menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 dalam pasal 5 huruf a merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk yaitu saling memberikan informasi, menyamakan persepsi dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan fasilitasi menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 pasal 5 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan rujukan sedangkan administrasi menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 pasal 5 huruf c merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan dan pelaporan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

1. Usia Informan

Usia Informan salah satu faktor yang menentukan penjelasan terhadap pengumpulan informan yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pernyataan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan peneliti butuhkan.

Kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan yang harus dilakukan, maka usia sangat berpengaruh dalam tingkat ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka dapat dilihat kriteria umur informan berikut:

Tabel V.1 Usia Informan Penelitian tentang Peranan Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	29-38	2
2	50-55	5
	Jumlah	7

Sumber : Data Penelitian Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang terdiri Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Camat Sentajo Raya, masyarakat dengan kriteria umur 29-55 Tahun.

2. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia memberikan informan yang benar. Mengapa jenis kelamin tidak berpengaruh, karena jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 **Jenis Kelamin Informan Penelitian tentang Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- Laki	2
2	Perempuan	5
	Jumlah	7

Sumber : Data Penelitian Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informan dan informan yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Camat Sentajo Raya, Masyarakat, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dari hasil menjawab pertanyaan yang di ajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informan tidak akan tidak akan sama persis antara informan dengan informan lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang diangkat

dalam penelitian, pemahaman informan juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang ia jalani.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dilihat dari tingkat pendidikan informan dalam penelitian tentang Peranan Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

Tabel V.3 Tingkat Penelitian Informan Penelitian tentang Peranan Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3
4	Diploma III (D.3)	-
5	Sastra Satu (S.1)	1
6	Sastra Dua (S.2)	1
	Jumlah	

Sumber: Data Penelitian Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 1 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan S2, 3 orang berpendidikan SMA, 2 orang berpendidikan SMP.

B. Hasil Penelitian Tentang Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yang mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sehingga pemerintah harus mempunyai inovasi – inovasi untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu inovasi pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan Bantuan Sembako Tunai.

Untuk memaksimalkan inovasi-inovasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sebuah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan biasa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung biasa dilakukan seperti memeriksa data realisasi penyaluran bantuan sosial dan pengawasan langsung dilakukan dengan melakukan survey langsung dilapangan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial ini tepat pada sasaran.

Pengawasan secara langsung yang dilakukan pemerintah adalah dengan merekrut orang atau tenaga bantuan sosial seperti antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau disebut TKSK dan Tenaga Program Kesejahteraan Harapan atau biasa di sebut tenaga PKH. fungsi mereka di rekrut oleh pemerintah adalah khusus untuk mengawasi dan mendata penyaluran-penyaluran batuan sosial yang ada.

Pada penelitian ini mengenai Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo

Raya Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan 4 Indikator sebagai olak ukur menjawab permasalahan yang ditemukan sebelumnya dalam bentuk fenomena. Untuk lebih jelas Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat diuraikan satu persatu indikator dengan berlandasan dari tanggapan (wawancara, observasi, dokumentasi) Kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk masing-masing indikator.

a. Perencanaan

Perencanaan menurut Terry(dalam Riyadi 2005) adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakanasumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan, karena perencanaan ini adalah langkah awal dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan.

Perencanaan merupakan suatu upaya dalam menentukan bermacam hal yang hendak dicapai di masa yang akan datang dan juga menentukan bermacam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut.Perencanaan juga bisa diartikan sebagai bentuk kegiatan yang sudah disusun demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya.

Dalam implementasinya perencanaan merupakan langkah awal dalam suatu kegiatan, karena didalamnya terdapat analisa-analisa terkait kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut nantinya akan dapat terlaksana dengan baik atau tidak semuanya tergantung perencanaan. perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat maksimal dan juga efisiensi operasional dalam suatu kegiatan.

Pada penelitian ini, peneliti membagi perencanaan dalam 2 bagian yaitu 1.Rencana kerja 2.Jadwal kerja. Dari 2 item penilaian tersebut akan dapat menyimpulkan hasil dari indikator perencanaan. Apakah perencanaan pada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Untuk itu peneliti akan menyajikan hasil penelitian indikator perencanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja

Dalam melakukan suatu kegiatan organisasi membutuhkan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua kegiatan yang terjadi.Oleh karena itu, setiap kegiatan hendaknya memiliki rencana kerja yang tersusun dengan baik, untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut. Dengan adanya rencana kerja yang tersusun dengan baik maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik

Dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya sudah mempunyai rencana kerja dalam kegiatan monitoring penyerahan bantuan sosial tunai (BST) dalam bentuk sembako dan merekap data-data penduduk yang membutuhkan bantuan hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mengatakan bahwa :

Rencana kerja TKSK ini menurut arahan dari Dinas Sosial sebagai perpanjangan kementerian, jadi kami hanya menunggu arahan

Tanggapan tersebut diatas menyebutkan bahwa memang perencanaan kegiatan ini memang sudah ada dan disiapkan orang dinas terkait yang membidangnya yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga kegiatan atau pekerjaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ini lebih terarah dan tepat sasaran. Hasil wawancara diatas di perjelas dengan hasil wawancara bersama Camat Sentajo Raya mengatakan bahwa :

Setau saya TKSK ini sudah mempunyai agenda kegiatan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Dalam suatu pekerjaan sangat di perlukan rencana kerja agar meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya Sudah mempunyai hal tersebut dan bisa dibuktikan juga dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara kepada penerima bantuan sosial tunai (BST) dalam bentuk sembako yaitu Lilisiana alamat Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya mengatakan bahwa :

Saya kurang tau, Tetapi pada saat penyaluran bantuan selalu tepat waktu.

Dia mengatakan kurang tau, ada atau tidaknya rencana kerja dari TKSK tetapi jika melihat dari realisasi pekerjaan dilapangan menunjukkan bahwa pekerjaan ini sudah terencana dengan baik, berikut hasil wawancara bersama Warsiyem alamat Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo raya mengatakan bahwa :

Saya kurang tau, tetapi mereka akan turun lapangan pada waktu-waktu tertentu.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dapat terkait perencanaan kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya sudah

memiliki rencana kegiatan sehingga mereka dapat optimal didalam bekerja dan minim kesalahan dalam tugasnya.

2. Jadwal Kerja

Jadwal kerja merupakan salah satu acuan sebelum melakukan kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugasnya sehari-hari. Untuk itu Peneliti juga melakukan wawancara terkait jadwal kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya kepada beberapa informan atau responden. Untuk mengetahui jadwal kerja TKSK peneliti menanyakan langsung kepada Nopes Scorpion, S.Sos sebagai TKSK Sentajo Raya mengatakan bahwa :

Kami mempunyai jadwal pekerjaan yaitu turun langsung kelapangan bukan bekerja dikantor saja.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya mempunyai jadwal kerja untuk turun kelapangan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat pada sasaran, selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait jadwal kerja TKSK kepada Camat Sentajo Raya di Kantor Camat Sentajo Raya mengatakan bahwa :

Kalau masalah jadwal kerja mereka tergantung agenda dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Hasil wawancara bersama Camat Sentajo Raya tersebut menyebutkan bahwa adanya jadwal kerja dari TKSK, untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada salah satu penerima bantuan sosial tunai (BST) dalam bentuk sembako yang bernama Lilisiana yang beralamat di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya, beliau mengatakan bahwa :

Kalau jadwal kerja mereka saya liat mereka hadir pada saat-saat penyaluran bantuan saja.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara terkait jadwal hadir TKSK, mereka sudah mempunyai jadwal tetap setiap bulannya. Seperti jadwal turun kelapangan baik itu untuk mendata dan untuk menyalurkan bantuan, jadi mereka tidak selalu berada di kantor saja. Mereka lebih banyak turun langsung kelapangan dari pada jadwal kerja di kantor. Dari hasil wawancara terkait jadwal kerja TKSK, peneliti menyimpulkan telah adanya jadwal kerja TKSK.

b. Pembagian Kerja

Menurut Hasibuan (2007). Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Dengan adanya pembagian kerja, maka setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari ketrampilan dan keahlian pada pekerjaan tertentu yang telah menjadi wewenang dan tanggung jawab mereka. Orang tersebut dapat terfokus pada beberapa pekerjaan saja yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga hal tersebut dapat memudahkan orang tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga efektivitas kerja orang tersebut dapat tercapai dan akhirnya tujuan organisasi pun tercapai.

Dalam indikator penelitian pembagian kerja tersebut peneliti membagi 2 item penilaian yaitu pembagian wilayah kerja dan pembagian tugas. Dari 2 item penilaian ini nantinya dapat diambil kesimpulan terkait indikator pembagian kinerja. Berikut ini adalah item penilaian :

1. Pembagian Wilayah Kerja

Suatu pekerjaan tentu harus jelas pembagian tugasnya. Hal itu untuk memaksimalkan suatu pekerjaan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan juga mempunyai pembagian kerja, yaitu pembagian wilayah kerja, 1 kecamatan 1 Tenaga Kesejahteraan Sosial agar tidak terlalu luas ruang lingkup atau jangkauan kerjanya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan TKSK Sentajo Raya yang mengatakan bahwa:

Pembagian wilayah kerja ini menurut batas-batas wilayah kecamatan, jika seseorang perlu perhatian TKSK wajib turun dengan catatan harus berkoordinasi juga dengan dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Sentajo Raya.

Dari hasil wawancara di atas, TKSK menyebutkan bahwa mempunyai batas-batas wilayah kerja, yang dimaksud dengan batas-batas wilayah adalah setiap kecamatan itu mempunyai 1 orang TKSK. Hal serupa juga di sampaikan Camat Sentajo raya dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

Pembagian wilayah kerja mereka sudah di atur, 1 Kecamatan 1 TKSK.

Dalam wawancara diatas jelas dikatakan 1 TKSK 1 Kecamatan. Dengan demikian agar kinerja yang dilakukan TKSK bisa maksimal dan bagus karena mereka fokus mengerjakan 1 kecamatan saja. Pembagian kerja juga meningkatkan tanggung jawab seseorang TKSK sehingga banyak manfaat dari adanya pembagian kerja. Hal yang sama juga disampaikan salah satu narasumber bernama Warsiyem berumur 55 tahun beralamat Desa Geringging Jaya mengatakan bahwa :

Cuma 1 orang TKSK di Kecamatan kami ini.

Dari beberapa informan yang dilakukan wawancara hampir semuanya menyebutkan bahwa pembagian kerja TKSK ini adalah 1 TKSK 1 Kecamatan. Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dalam pembagian wilayah kerja ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembagian wilayah kerja TKSK ini sudah sesuai. Sehingga TKSK dapat fokus mengontrol wilayah-wilayahnya saja dan tidak terlalu luas wilayah kerjanya.

2. Pembagian Tugas

Dalam tugas nya TKSK harus ada pembagian kerjanya dengan kecamatan agar tidak terjadinya kesalahan data dan informasi dalam tugas. Walaupun TKSK ini di bawah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentu tidak bisa pula bekerja atas arahan dari dinas saja tentu harus ada pembagian-pembagian tugas mereka dengan pihak Kecamatan.

Untuk mengetahui adanya pembagian tugas antara TKSK dengan Pihak Kecamatan. Berikut hasil wawancara dengan TKSK Sentajo Raya Nopes Scorpion, S.Sos. mengatakan bahwa :

Pembagian tugasnya jelas, karena TKSK dibawah naungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa jadi semua tugas yang di emban bisa membantu tugas kecamatan juga.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa pembagian tugas TKSK ini mempunyai dua tugas, ada tugas pokok dan bisa juga di berdayakan oleh pihak kecamatan. Hal ini menguntungkan juga bagi kecamatan dapat terbantu didalam kerjaan pelayanan kepada masyarakat, untuk memperkuat pernyataan diatas, peneliti juga mewawancarai Camat Sentajo Raya yaitu H.Yulizar M. S.Sos, M.Si di kantor Camat Sentajo Raya, mengatakan bahwa :

Pembagian tugas mereka sudah ada, antara lain mengontrol penyaluran bantuan kepada masyarakat dan membantu dalam pendataan masyarakat yang layak menerima bantuan.

Dipembagian tugas antara TKSK dan pihak Kecamatan Sentajo Raya sebenarnya sudah ada dan jelas tetapi jika di lakukan wawancara kepada Penerima Bantuan Sosial ini, rata-rata mereka menyampaikan tidak tau pasti. Hal ini dikarenakan bukan urusan mereka. Hal pembagian tugas ini bisa di lihat jelas di Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas TKSK tersebut sudah jelas.

c. Komunikasi

Pengertian komunikasi menurut Michael Burgoon Dan Michael Ruffner (dalam Komala: 2009) komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat: 4 elemen yang tercakup dalam definisi tersebut: Interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi, maksud dan tujuan yang dikehendaki, kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya.

Dalam tugas sebagai tenaga sosial merupakan sebuah profesi pertolongan yang bersifat sukarela. Tenaga sosial harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Tenaga sosial dengan keterampilan komunikasi yang baik, akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini didukung

dengan keharusan para tenaga sosial agar mampu untuk memberikan bantuan sesuai posisinya kepada masyarakat. Tenaga sosial menempatkan masyarakat dalam lingkungan sosialnya agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya.

Keterampilan komunikasi tenaga sosial bukan merupakan keterampilan instan yang bisa diperoleh dengan mudah. Keterampilan komunikasi ini diperoleh melalui proses belajar, bisa melalui proses pendidikan, maupun melalui pengalaman atau jam terbang sebagai seorang tenaga sosial. Kedua proses ini tidak bisa diabaikan, olehnya itu dalam prakteknya selain mengasah berbagai kemampuan yang bersifat prosedural, juga menjadi ajang mengasah kelugasan komunikasi dengan berbagai pihak yang memungkinkan memberikan pertolongan kepada masyarakat.

Tenaga sosial dalam melaksanakan tugasnya tentunya memerlukan bantuan orang lain. Kemampuan tenaga sosial untuk memberikan informasi terkait pelayanan yang diberikan merupakan bagian penting dari kemampuan komunikasi. Tenaga sosial dapat menggambarkan dengan benar segala yang terjadi kepada mitra kerja dan sistem sumber jika mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini berlaku sebaliknya. Akibatnya, pertolongan yang tepat bisa segera diberikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat untuk sistem sumber yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa keterampilan komunikasi itu sangat penting baik digunakan kepada masyarakat dengan berbagai gaya penyampaian yang meliputi bahasa dan gesture maupun kepada sistem sumber yang bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat. Hal ini

menekankan bahwa tenaga sosial mempunyai keterampilan komunikasi yang baik merupakan sebuah keharusan dan tidak bisa dipisahkan dengan keterampilan lainnya.

Untuk menilai indikator dalam komunikasi peneliti membagi 2 item penilaian yaitu koordinasi dan komunikasi karena hal ini nantinya akan dapat memperjelas hasil penelitian. Untuk itu peneliti akan melakukan analisa berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Berikut hasil wawancara dilapangan :

1. Koordinasi dengan Pihak Kecamatan

TKSK dalam tugas harus berkoordinasi dengan kecamatan agar sinkron data yang dimiliki oleh TKSK dan Kecamatan, sehingga tidak adanya tumpang tindih antar data. Untuk mengetahui berjalan baik koordinasi di TKSK dengan Kecamatan, peneliti mewawancarai langsung TKSK Sentajo Raya Nopes Scorpion mengatakan bahwa :

Koordinasi berjalan lancar dan baik, karena apa-apa yang akan dikerjakan tentunya seizin kecamatan juga.

Koordinasi merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu pekerjaan, jika hal ini kurang baik tentunya banyak akan terjadi keshalaan-kesalahan dalam pekerjaan. Hasil dari wawancara diatas menyebutkan bahwa adanya koordinasi antara TKSK dan Kecamatan. Selanjutnya peneliti mewawancarai Camat Sentajo Raya H. Yulizar M. S.Sos, M.Si, mengatakan bahwa :

Kalau terkait koordinasi menurut saya masih kurang, dikarenakan walaupun mereka bekerja dikecamatan tetapi laporan-laporan dan agenda-agenda mereka lakukan masih berkoordinasinya kebanyakan dengan orang dinas. Sehingga terkadang sering masih adanya kekeliruan baik itu data maupun agenda-agendayang ada di kecamatan. (Senin,22 Maret 2021)

Hasil wawancara dengan Camat Sentajo Raya menyatakan masih kurangnya koordinasi TKSK dengan pihak Kecamatan. Untuk mengetahui lebih dalam terkait koordinasi ini peneliti akan menanyakan kepada penerima bantuan sosial karena mereka bisa melihat langsung dilapangan, peneliti melakukan wawancara dengan Lilisiana warga Desa Gerigging Baru yang mengatakan bahwa:

Kalau menurut saya kurang, karena saya lihat masih ada penerima bantuan yang kurang sesuai.

Kesalahan-kesalahan dalam pendataan bisa terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi. Seharusnya TKSK selalu menanyakan dan menyampaikan data-datanya kepada pihak kecamatan juga, bukan hanya kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil wawancara kepada Rosmaniar umur 50 tahun warga Desa Kampung Baru Sentajo yang mengatakan bahwa :

Kurang. Saya liat TKSK sering sendiri turun ke Desa saya tanpa pendampingan orang Kecamatan.

Seharusnya dalam peninjauan lapangan TKSK harus mengajak pihak Kecamatan Sentajo Raya, karena yang mengetahui pasti bagaimana kondisi lapangan, seperti warga mana saja yang membutuhkan bantuan sosial dan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kurang baiknya koordinasi TKSK dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya. Hal tersebut membuat adanya terjadi kesalahan-kesalahan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

2. Komunikasi dengan Pihak Penerima Bantuan

Selain koordinasi diperlukan juga komunikasi yang baik. Karena ini merupakan satu kesatuan didalam melaksanakan kerjaan. TKSK dan pihak Kecamatan Sentajo Raya harus mempunyai komunikasi yang baik, dalam hal pendataan ataupun masalah-masalah dilapangan yang dihadapi TKSK. Berikut untuk mengetahui bagaimana komunikasi TKSK dan Pihak Kecamatan Sentajo Raya. Peneliti melakukan wawancara kepada TKSK Sentajo Raya, mengatakan bahwa :

Komunikasi berjalan lancar dan baik, karena mengingat kerjaan ini tidak bisa dilakukan sendiri jadi harus meminta persetujuan kecamatan

Berjalan lancar atau tidaknya suatu pekerjaan tergantung dari komunikasi, dari hasil wawancara diatas TKSK mengatakan bahwa adanya komunikasi yang baik dengan Pihak Kecamatan Sentajo Raya, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan ulasan perkataan Camat Sentajo Raya mengatakan bahwa :

TKSK ada berkomunikasi dengan Kecamatan tetapi hanya beberapa hal saja seperti jadwal penyaluran bantuan saja, terkait data penerima bantuan mereka tidak ada berkoordinasi.

Dalam hasil wawancara dengan Camat Sentajo Raya ini peneliti menyimpulkan masih kurangnya komunikasi di TKSK dengan pihak Kecamatan. Untuk mengetahui lebih dalam, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang menerima bantuan sosial bernama warsiyem, karena mereka bisa mengamati langsung dilapangan. Beliau mengatakan bahwa :

Menurut saya kurang. Pernah ada dulu perubahan data di desa kami, disampaikan ke kecamatan perubahannya tetapi data di TKSKnya tidak berubah.

Hal serupa juga disampaikan salah satu penerima bantuan langsung tunai atau bantuan sosial bernama Fauziah warga Desa Jalur Patah, mengatakan bahwa :

Kurang baik. Data yang diusulkan desa ke kecamatan tidak sesuai dengan data TKSK.

Kemudian Penerima Bantuan Langsung Tunai bernama Rosmaniar warga Desa kampung Baru Sentajo mengatakan bahwa :

Kurang juga. Karena tidak sesuai waktunya. Saya Tanya kecamatan tanggal segini, Tanya lagi sama TKSK tanggalnya beda, kadang kami bingung.

Dari beberapa hasil wawancara diatas terkait komunikasi TKSK dengan Pihak Kecamatan Sentajo Raya masih Kurang Baik. Hal ini dibuktikan masih banyaknya kesalahan-kesalahan data dan informasi jadwal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dalam bentuk sembako kepada masyarakat yang menerima bantuan. Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dapat disimpulkan masih kurang baik dan maksimalnya komunikasi.

d. Pertemuan

Menurut Priansa dan Garnida (2013:181) pertemuan (rapat) adalah salah satu bentuk pertemuan orang-orang dalam suatu organisasi, untuk membicarakan segala permasalahan orang yang terjadi, sehingga organisasi mampu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

1. Rapat-Rapat

Sebelum melakukan kegiatan seharusnya TKSK dan Pihak Kecamatan Sentajo Raya Harus mengadakan Rapat terlebih dahulu agar nantinya mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada TKSK Sentajo Raya. Beliau mengatakan bahwa :

Acara rapat telah di agendakan setiap bulannya, disana dibahas mengenai masalah-masalah yang ditemukan dilapangan dan juga rapat tersebut sebagai evaluasi oleh dinas sosial.

Hasil dari wawancara di atas mengatakan adanya agenda rapat setiap bulan. Ini merupakan hal yang penting sekali untuk mengevaluasi pekerjaan selama 1 bulan. Berikut hasil wawancara dengan Camat Sentajo Raya mengatakan bahwa :

Dalam 1 bulan sekali ada dilaksanakan agenda rapat dengan kecamatan pada saat akan melakukan penyaluran bantuan sosial tersebut.

Dengan adanya pernyataan Camat tersebut, TKSK dan Pihak Kecamatan memang ada melakukan Rapat tetapi hanya 1 kali. Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dapat disimpulkan hal ini masih sangat kurang, karena sebaiknya sebelum turun kelapangan, sebelum penyaluran, dalam pendataan dan selesai kegiatan harus di adakan rapat agar kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tepat pada sasaran.

C. Hambatan-hambatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan peranan Tenaga Kesejahteraan Kecamatan mempunyai hambatan – hambatan sebagai berikut :

1. Kurang nya Komunikasi antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya
2. Kurangnya Pertemuan berupa rapat kerja antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian terkait Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya, peneliti mempunyai 4 unsur dalam meneliti yaitu unsur perencanaan, pembagian kerja, komunikasi dan pertemuan. Berdasarkan hasil penelitian melalui 4 unsur tersebut peneliti menemukan masih adanya kekurangan pada unsur komunikasi dan pertemuan. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan hasil penelitian sebagai berikut

1. Perencanaan

Dalam perencanaan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya sudah baik, hal ini di buktikan dengan adanya perencanaan dan jadwal kerja yang sudah tersusun.

2. Pembagian Kerja

Pada pembagian kerja, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya sudah baik, dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan memiliki pembagian wilayah kerja 1 kecamatan 1 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, sehingga bisa berkerja secara maksimal.

3. Komunikasi

Terkait komunikasi, Tenaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya masih kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil

wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa masih kurangnya koordinasi antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya dengan pihak kecamatan. Ini menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pendataan pada penerima bantuan sosial tunai dalam bentuk sembako, bantuan tersebut masih ada yang tidak sesuai penerimanya. Telah dilakukan perbaikan data melalui desa dan disampaikan ke pihak kecamatan tetapi data tersebut tidak juga terjadi perubahan.

4. Pertemuan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya dan pihak Kecamatan telah melakukan rapat, akan tetapi hanya 1 kali pertemuan saja. Hal tersebut masih sangat kurang.

5. Hambatan – hambatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

- a. Kurang nya Komunikasi antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya
- b. Kurangnya Pertemuan berupa rapat kerja antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak Kecamatan Sentajo Raya

B. Saran

1. Terkait komunikasi, peneliti menyarankan agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan agar lebih banyak melakukan komunikasi dengan kecamatan pada saat pendataan dan proses penyaluran bantuan dan harus melibatkan pihak kecamatan. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam data penerima, penyaluran tepat pada sasaran dan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sentajo Raya.
2. Dalam Pertemuan, peneliti menyarankan agar lebih sering mengadakan rapat evaluasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada, karena apabila ada kesalahan di dalam pekerjaan dapat dijadikan bahan evaluasi dan disampaikan pada saat rapat antara Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Sentajo Raya dan pihak Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbani Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Berry, David. 2003. *Pokok- Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta .
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Fahrudin, Adi 2012.*Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Giroth, Lexie. M. 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Jatinagor, indrapraharta
- Hasibuan, Malayu S. P.. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PTBumi Aksara.
- Kaho, 2002.*Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta, Rineka Cipta
- Laboho, Muhadam 2006.*Memahami Ilmu Pemerintah(suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Riyadi Dan Bratakusumah, 2005 :*Peran Masyarakat dalam Pembangunan*,Multigrafika, Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid1*. Rineka Cipta : Jakarta.
- _____. 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong, J Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Gungung Agung.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Gungung Agung.
- _____.2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal. 2004 *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori kePraktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto.Soekanto. 2002.*Teori Peranan*.PT Bumi Aksara.Jakarta.

_____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persabda

Suharto. 2009. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.

_____. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.

_____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

DOKUMEN :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Sumber Jurnal/Skripsi :

Ruli Insani Adhitya. Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi kasus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Umbulharjo Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pakualaman). Skripsi program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wisnu Andrianto, M Saleh Soeaidy, Stefanus Pani Rengu.2014. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). FISIP. Vol 2 No 2 Hal 202-209





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +6276 1674874 Fax. +6276 1674834 Email: fispol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 2896 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Sintya Delpianti D
NPM : 177310030
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
Persentase Plagiasi : 25 %
Jumlah Halaman : 89 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru.
Pada Tanggal : 03 November 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPM. 970702230